



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

**PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, sasaran, fokus, dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pengawasan adalah:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan meliputi:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pengawasan tersebut disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

- b. Rencana Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam program kerja yang merupakan acuan bagi kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing APIP di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2021.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan perubahan oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Dalam hal Perangkat Daerah Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 Februari 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 Februari 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd
PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **2**



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

I. JENIS PENGAWASAN INTERN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

A. Kegiatan Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kegiatan audit terbagi menjadi dua, yaitu

a. Audit Kinerja:

Bertujuan menilai kinerja suatu organisasi, program atau kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan menilai aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu:

Bertujuan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit kinerja.

B. Kegiatan Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

C. Kegiatan Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

D. Kegiatan Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

II. KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

a. Audit Kinerja, pada:

1. Perangkat Daerah;
2. SMA/SMK/SLB Negeri; dan
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu, pada :

1. Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Bantuan Keuangan Gubernur ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bantuan Keuangan Gubernur ke Pemerintah Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten;
5. Penyaluran Dana BOS SMA/SMK Swasta;
6. Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi;
7. Pelayanan Publik UPTD Provinsi Jawa Tengah;
8. Pendapatan Asli Daerah;
9. Proses Perizinan dan Non Perizinan;
10. Forensik Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Kepatuhan Perangkat Daerah; dan
12. Dana Hibah.

c. Reviu, pada:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
5. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
6. Rencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

d. Evaluasi, pada:

1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.

e. Pemantauan, pada:

1. Transfer Dana Desa; dan
2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JANUARI 2021										
1	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	1. Kab. Boyolali 2. Kab. Pemalang 3. Kab. Semarang 4. Kota Magelang 5. Kota Pekalongan 6. Kota Semarang	RMP : 04 Januari 2021 RSP : 29 Januari 2021 RPL : 05 Maret 2021 HP : 20 Hari	54	Rp694,000,000	6	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
2	Reviu	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemertintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 06 Januari 2021 RSP : 27 Januari 2021 RPL : - HP : 16 Hari	9	Rp115,200,000	-	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
4	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Swasta	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa Bantuan Operasional Sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Sekolah SMA/SMK Swasta di Kota Semarang	RMP : 11 Januari 2021 RSP : 15 Januari 2021 RPL : 19 Februari 2021 HP : 05 Hari	5	Rp3,750,000	3	Sedang	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
Jumlah							Rp883,690,000	18		
FEBRUARI 2021										
1	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	1. Kab. Blora 2. Kab. Klaten 3. Kab. Purbalingga 4. Kab. Rembang 5. Kab. Wonosobo 6. Kota Surakarta	RMP : 01 Februari 2021 RSP : 26 Februari 2021 RPL : 02 April 2021 HP : 19 Hari	54	Rp780,420,000	6	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
2	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 04 Februari 2021 RSP : 26 Februari 2021 RPL : - HP : 16 Hari	9	Rp115,200,000	-	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
4	Audit dengan tujuan tertentu	Pelayanan Publik UPTD pada SKPD Provinsi	Menilai tingkat pelayanan publik yang ada di SKPD Provinsi	1. UPPD Kab. Klaten 2. UPPD Kab. Sukoharjo	RMP : 15 Februari 2021 RSP : 26 Februari 2021 RPL : 02 April 2021 HP : 10 Hari	5	Rp38,500,000	2	Sedang	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
Jumlah							Rp1,004,860,000	17		
MARET 2021										
1	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	1. Kab. Grobogan 2. Kab. Kebumen 3. Kab. Kendal 4. Kab. Purworejo 5. Kab. Sukoharjo 6. Kab. Wonogiri	RMP : 03 Maret 2021 RSP : 31 Maret 2021 RPL : 06 Mei 2021 HP : 19 Hari	54	Rp780,420,000	6	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
2	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 08 Maret 2021 RSP : 30 Maret 2021 RPL : 04 Mei 2021 HP : 16 Hari	9	Rp115,200,000	1	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
4	Reviu	Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa indikator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang memadai	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 08 Maret 2021 RSP : 12 Maret 2021 RPL : 16 April 2021 HP : 04 Hari	5	Rp11,100,000	1	Tinggi	Irbansus
5	Reviu	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 08 Maret 2021 RSP : 12 Maret 2021 RPL : 16 April 2021 HP : 04 Hari	5	Rp9,250,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kinerja yang berkualitas							
6	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
7	Pengawasan lainnya	Bimbingan Teknis	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi APIP Provinsi Jawa Tengah.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	03 Hari	40	Rp 61,659,000	-	-	Sekretariat
Jumlah							Rp1,048,369,000	18		
APRIL 2021										
1	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	Kab. Sragen	RMP : 05 April 2021 RSP : 30 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 20 Hari	6	Rp89,600,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Boyolali	RMP : 07 April 2021 RSP : 23 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Karanganyar	RMP : 07 April 2021 RSP : 20 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 10 Hari	5	Rp38,500,000	1	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	RMP : 21 April 2021 RSP : 23 April 2021 RPL : 09 Juni 2021 HP : 03 Hari	5	Rp12,050,000	1	Tinggi	Irbanwil I
5	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	Kab. Demak	RMP : 05 April 2021 RSP : 30 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 20 Hari	6	Rp89,600,000	1	Tinggi	Irbanwil II
6	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Jepara	RMP : 07 April 2021 RSP : 23 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil II
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Pati	RMP : 07 April 2021 RSP : 20 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 10 Hari	5	Rp38,500,000	1	Tinggi	Irbanwil II
8	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pati	RMP : 21 April 2021 RSP : 23 April 2021 RPL : 09 Juni 2021 HP : 03 Hari	5	Rp12,050,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	Kab. Pekalongan	RMP : 05 April 2021 RSP : 30 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 20 Hari	6	Rp89,600,000	1	Tinggi	Irbanwil III
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Brebes	RMP : 07 April 2021 RSP : 23 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil III
11	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Brebes	RMP : 07 April 2021 RSP : 20 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 10 Hari	5	Rp38,500,000	1	Tinggi	Irbanwil III
12	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Brebes	RMP : 21 April 2021 RSP : 23 April 2021 RPL : 09 Juni 2021 HP : 03 Hari	5	Rp12,050,000	1	Tinggi	Irbanwil III
13	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Reviu	Melaksanakan Reviu Standar Satuan Harga (SSH) untuk SSH Tahun 2020 dan Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) Prov. Jateng dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk Tahun 2020	Memberikan keyakinan terbatas bahwa kewajaran penyusunan SSH, ASB dan HSPK telah sesuai dengan harga pasar	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP : 12 April 2021 RSP : 28 April 2021 RPL : 04 Juni 2021 HP : 13 Hari	12	Rp23,400,000	1	Tinggi	Irbansus
15	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
Jumlah							Rp660,240,000	22		
MEI 2021										
1	Pengawasan lainnya	Bimbingan Teknis	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi APIP Provinsi Jawa Tengah.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	03 Hari	40	Rp61,659,000	-	-	Sekretariat
2	Pengawasan lainnya	Pelatihan Kantor Sendiri	Peningkatan kemampuan APIP terhadap hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	01 Hari	40	Rp32,374,000	-	-	Sekretariat
3	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
Jumlah							Rp124,273,000	7		
JUNI 2021										

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Purworejo	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 03 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Kab. Kebumen 2. Kab. Klaten	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 25 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 10 Hari	10	Rp77,000,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	1. Kab. Kebumen 2. Kab. Klaten	RMP : 28 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 03 Hari	10	Rp24,100,000	1	Tinggi	Irbanwil I
4	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Semarang	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 03 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil II
5	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Kab. Grobogan 2. Kab. Semarang	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 25 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 10 Hari	10	Rp77,000,000	1	Tinggi	Irbanwil II
6	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	1. Kab. Grobogan 2. Kab. Semarang	RMP : 28 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 03 Hari	10	Rp24,100,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Wonosobo	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 03 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil I
8	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Wonosobo	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 25 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 10 Hari	10	Rp77,000,000	1	Tinggi	Irbanwil I
9	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Wonosobo	RMP : 28 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 03 Hari	10	Rp24,100,000	1	Tinggi	Irbanwil I
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
11	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Forensik Sistem UKPBJ	Mengetahui bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada LPSE telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa	RMP : 07 Juni 2021 RSP : 11 Juni 2021 RPL : 09 Juli 2021 HP : 05 Hari	5	Rp3,750,000	1	Tinggi	Irbansus
12	Reviu	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RMP : 21 Juni 2021 RSP : 25 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 05 Hari	12	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Reviu	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap I	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP : 07 Juni 2021 RSP : 25 Juni 2021 RPL : 30 Juli 2021 HP : 15 Hari	10	Rp113,500,000	14	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus	
14	Reviu	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD	9 SKPD Sampel	RMP : 29 Juni 2021 RSP : 02 Juli 2021 RPL : 06 Agustus 2021 HP : 04 Hari	9	Rp16,110,000	9	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III	
15	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat	
Jumlah								Rp662,050,000	43		

JULI 2021

1	Audit Kinerja	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah	Membantu mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sehingga dapat memacu peningkatan kinerja secara lebih sehat, mandiri, dan akuntabel	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT)	RMP : 05 Juli 2021 RSP : 23 Juli 2021 RPL : 27 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp25,850,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Demak	RMP : 05 Juli 2021 RSP : 23 Juli 2021 RPL : 27 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP : 05 Juli 2021 RSP : 16 Juli 2021 RPL : 20 Agustus 2021 HP : 10 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Blora	RMP : 05 Juli 2021 RSP : 23 Juli 2021 RPL : 27 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil II	
5	Audit Kinerja	SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SLB Negeri Cilacap 2. SLB Negeri Kroya, Cilacap	RMP : 05 Juli 2021 RSP : 23 Juli 2021 RPL : 27 Agustus 2021 HP : 12 Hari	5	Rp48,550,000	2	Tinggi	Irbanwil III	
6	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Cilacap	RMP : 14 Juni 2021 RSP : 30 Juni 2021 RPL : 03 Agustus 2021 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil III	
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus	
8	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Melakukan Evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 Kab/Kota	RMP : 05 Juli 2021 RSP : 27 Juli 2021 RPL : 03 September 2021 HP : 15 Hari	36	Rp397,800,000	12	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus	
9	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat	
Jumlah								Rp691,990,000	28		
AGUSTUS 2021											

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
2	Evaluasi	Evaluasi SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	48 SKPD	RMP : 01 Agustus 2021 RSP : 06 Agustus 2021 RPL : 10 September 2021 HP : 05 Hari	60	Rp45,000,000	48	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
3	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	10 Kab/Kota	RMP : 09 Agustus 2021 RSP : 27 Agustus 2021 RPL : 01 Oktober 2021 HP : 13 Hari	60	Rp578,600,000	10	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III 2. Irbansus
4	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
5	Pengawasan lainnya	Bimbingan Teknis	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi APIP Provinsi Jawa Tengah.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	03 Hari	40	Rp61,659,000	-	-	Sekretariat
Jumlah							Rp755,999,000	67		
SEPTEMBER 2021										
1	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	1. Dinas Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan	RMP : 06 September 2021 RSP : 24 September 2021 RPL : - HP : 15 Hari	16	Rp105,840,000	3	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pencatatan Sipil						
2	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Sosial	RMP : 06 September 2021 RSP : 24 September 2021 RPL : - HP : 15 Hari	16	Rp105,840,000	3	Tinggi	Irbawil II
3	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RMP : 06 September 2021 RSP : 24 September 2021 RPL : - HP : 15 Hari	16	Rp105,840,000	3	Tinggi	Irbawil III
4	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
5	Audit dengan tujuan tertentu	Probity Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 (dua) paket pekerjaan	RMP : 06 September 2021 RSP : 24 September 2021 RPL : 29 Oktober 2021 HP : 15 Hari	5	Rp37,800,000	2	Tinggi	Irbansus
6	Reviu	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap II	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP : 06 September 2021 RSP : 24 September 2021 RPL : 29 Oktober 2021 HP : 15 Hari	9	Rp113,500,000	12	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbawil I, II, dan III 2. Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Reviu	RKA Perubahan 2020	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA Perubahan 2020	9 SKPD Sampel	RMP : 30 Agustus 2021 RSP : 03 September 2021 RPL : 08 Oktober 2021 HP : 05 Hari	9	Rp18,810,000	9	Tinggi	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III
8	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
Jumlah							Rp617,850,000	41		
OKTOBER 2021										
1	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang 3. Dinas Pertanian dan Perkebunan	RMP : 04 Oktober 2021 RSP : 22 Oktober 2021 RPL : 26 November 2021 HP : 15 Hari	16	Rp105,840,000	3	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	RMP : 04 Oktober 2021 RSP : 22 Oktober 2021 RPL : 26 November 2021 HP : 15 Hari	16	Rp105,840,000	3	Tinggi	Irbanwil II
3	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	RMP : 04 Oktober 2021 RSP : 22 Oktober 2021 RPL : 26 November 2021 HP : 15 Hari	16	Rp105,840,000	3	Tinggi	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
5	Audit dengan tujuan tertentu	Probity Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 (dua) paket pekerjaan	RMP : 11 Oktober 2021 RSP : 29 Oktober 2021 RPL : 03 Desember 2021 HP : 15 Hari	5	Rp37,800,000	2	Tinggi	Irbansus
6	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah ada dan dilaksanakan dengan baik supaya PAD yang seharusnya menjadi hak daerah telah diterima tepat waktu dan tepat jumlah dan telah ditatausahakan dan dicatat secara tertib serta dipertanggungjawabkan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 11 Oktober 2021 RSP : 29 Oktober 2021 RPL : 03 Desember 2021 HP : 15 Hari	5	Rp37,800,000	1	Tinggi	Irbansus
7	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
8	Pengawasan lainnya	Bimbingan Teknis	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi APIP Provinsi Jawa Tengah.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	03 Hari	40	Rp61,659,000	-	-	Sekretariat
Jumlah							Rp525,519,000	21		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

NOVEMBER 2021

1	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSUD Kelet, Jepara	RMP : 08 November 2021 RSP : 23 November 2021 RPL : 23 Desember 2021 HP : 12 Hari	5	Rp26,600,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit kepatuhan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Memberikan keyakinan memadai bahwa semua perizinan dan non-perizinan telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Jateng	RMP : 08 November 2021 RSP : 23 November 2021 RPL : 23 Desember 2021 HP : 12 Hari	5	Rp26,600,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Ketaatan Biro Sekretariat Daerah	Untuk memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Organisasi	RMP : 08 November 2021 RSP : 19 November 2021 RPL : 24 Desember 2021 HP : 10 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil I
4	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSJD Surakarta	RMP : 08 November 2021 RSP : 23 November 2021 RPL : 23 Desember 2021 HP : 12 Hari	5	Rp26,600,000	1	Tinggi	Irbanwil II
5	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Aset Daerah	Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan secara transparan dan akuntabel	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 08 November 2021 RSP : 23 November 2021 RPL : 23 Desember 2021 HP : 12 Hari	5	Rp26,600,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit pengelolaan kepegawaian di pemprov jateng	Mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 08 November 2021 RSP : 19 November 2021 RPL : 24 Desember 2021 HP : 10 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil II
7	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSUD Dr. Moewardi, Surakarta	RMP : 08 November 2021 RSP : 23 November 2021 RPL : 23 Desember 2021 HP : 12 Hari	5	Rp26,600,000	1	Tinggi	Irbanwil III
8	Audit Kinerja	Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah: Penanggulangan Kemiskinan	Menilai capaian antara program/ kegiatan yang ada terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	RMP : 04 Oktober 2021 RSP : 22 Oktober 2021 RPL : 26 November 2021 HP : 15 Hari	5	Rp34,450,000	1	Tinggi	Irbanwil III
9	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Ketaatan Biro Sekretariat Daerah	Untuk memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Umum	RMP : 08 November 2021 RSP : 19 November 2021 RPL : 24 Desember 2021 HP : 10 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil III
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
11	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Dana Hibah ke KONI Jawa Tengah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana hibah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	KONI Jawa Tengah	RMP : 08 November 2021 RSP : 26 November 2021 RPL : 23 Desember 2021 HP : 15 Hari	5	Rp34,450,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Reviu	RKA Murni 2021	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA Murni 2021	9 SKPD Sampel	RMP : 22 November 2021 RSP : 26 November 2021 RPL : 31 Desember 2021 HP : 05 Hari	9	Rp6,750,000	9	Sedang	Tim Gabungan dari: 1. Irbanwil I, II, dan III
13	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
14	Pengawasan lainnya	Pelatihan Kantor Sendiri	Peningkatan kemampuan APIP terhadap hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	01 Hari	40	Rp32,374,000	-	-	Sekretariat
Jumlah							Rp334,264,000	28		
DESEMBER 2021										
1	Audit Kinerja	Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Urusan Trantibumlinmas	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Temanggung	RMP : 01 Desember 2021 RSP : 17 Desember 2021 RPL : 28 Januari 2022 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit Kinerja	SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SLB Negeri Cangkanan, Karanganyar 2. SLB Negeri Colomadu, Karanganyar 3. SLB Negeri Cendono, Kudus 4. SLB Negeri Purwosari, Kudus	RMP : 01 Desember 2021 RSP : 17 Desember 2021 RPL : 28 Januari 2022 HP : 12 Hari	10	Rp88,900,000	4	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit Kinerja	Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Urusan Trantibumlinmas	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Magelang	RMP : 01 Desember 2021 RSP : 17 Desember 2021 RPL : 28 Januari 2022 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Audit Kinerja	SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SLB Negeri Lasem, Rembang 2. SLB Negeri Rembang 3. SLB Negeri Semarang 4. SLB Negeri Ungaran	RMP : 01 Desember 2021 RSP : 17 Desember 2021 RPL : 28 Januari 2022 HP : 12 Hari	10	Rp88,900,000	4	Tinggi	Irbanwil II
5	Audit Kinerja	Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota Urusan Trantibumlinmas	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kota Tegal	RMP : 01 Desember 2021 RSP : 17 Desember 2021 RPL : 28 Januari 2022 HP : 13 Hari	5	Rp48,550,000	1	Tinggi	Irbanwil I
6	Audit Kinerja	SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SLB Negeri 1 Pemalang 2. SLB Negeri 2 Pemalang 3. SLB Negeri Banjarnegara 4. SLB Negeri Mandiraja, Banjarnegara	RMP : 01 Desember 2021 RSP : 17 Desember 2021 RPL : 28 Januari 2022 HP : 12 Hari	10	Rp88,900,000	4	Tinggi	Irbanwil I
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi/Kasus	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp40,500,000	2	Tinggi	Irbansus
8	Audit dengan tujuan tertentu	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Swasta	Untuk memastikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 SMA/SMK Swasta di Kota Salatiga	RMP : 06 Desember 2021 RSP : 10 Desember 2021 RPL : 14 Januari 2022 HP : 05 Hari	5	Rp20,250,000	3	Sedang	Irbansus
9	Pemantauan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP/ BPK	Untuk memberikan penilaian kemajuan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap auditii	48 SKPD 35 Kab/Kota	14 Hari	15	Rp30,240,000	7	Tinggi	Sekretariat
Jumlah							Rp503,340,000	27		
Jumlah Total							Rp7,691,345,000	337		

CATATAN :

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan

RSP = Rencana Selesai Pemeriksaan

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

HP = Hari Pemeriksaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2021												KETERANGAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH																
I	SEKRETARIAT DAERAH													A	Itjen Kementerian Dalam Negeri	
	1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah														
	2	Biro Kesejahteraan Rakyat													B	Itjen Kementerian ESDM
	3	Biro Infrastuktur dan Sumber Daya Alam														
	4	Biro Hukum													C	Itjen Kementerian Perindustrian
	5	Biro Organisasi											X6			
	6	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama													D	Itjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	7	Biro Perekonomian Daerah														
	8	Biro Umum											X6		E	Itjen Kementerian Pertanian
	9	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa					X8	X6								
														F	Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan	
II	SEKRETARIAT DPRD															
	1	Sekretariat DPRD												G	Itjen Kementerian Perhubungan	
III	INSPEKTORAT													H	Itjen Kementerian Ketenagakerjaan	
	1	Inspektorat														
														I	Itjen Kementerian Kesehatan	
IV	DINAS DAERAH															
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									X9			J	Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	Dinas Kesehatan									X9					
	3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya									X9			K	Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang										X9				

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2021											KETERANGAN		
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV		DES	
	6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													X8	Audit Forensik
	7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
															X9	Audit Program Prioritas Gubernur
	BADAN PENGHUBUNG															
VI	1	Badan Penghubung													X10	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah
	RUMAH SAKIT														X11	Audit Dana Hibah
	1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto														
	2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta													X10	
	3	RSUD Tugurejo Semarang														
VII	4	RSUD Kelet Jepara													X10	
	5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang														
	6	RSJD Dr. RM. Soedjawardi Klaten														
	7	RSJD Surakarta													X10	
	BADAN USAHA MILIK DAERAH															
	1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah														
	2	PT Citra Mandiri Jawa Tengah														
	3	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah							X1							
	4	PT Perusahaan Daerah Air Bersih														
VIII	5	PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan														
	6	PT Sarana Patra Hulu Cepu														
	7	PT Asuransi Bangun Askrida														
	8	PT Jamkrida Jateng														
	9	Kawasan Industri Wijaya Kusuma														
	10	PT BPR BKK														
	KABUPATEN / KOTA															
IX	1	Kab. Banjarnegara														
	2	Kab. Banyumas							X4,							

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2021											KETERANGAN		
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV		DES	
	30	Kota Magelang	X7													
	31	Kota Pekalongan	X7													
	32	Kota Salatiga														
	33	Kota Semarang	X7													
	34	Kota Surakarta		X7												
	35	Kota Tegal													X2	
		INSTANSI VERTIKAL														
X	1	KPU Provinsi Jawa Tengah														
	2	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah														
	3	KONI Jawa Tengah												X11		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO